



**LAPORAN KEUANGAN  
AUDITED  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN  
DKI JAKARTA  
Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2025**

**BAGIAN ANGGARAN 005.05  
BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**PENGADILAN TINGGI  
TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jl. Cikini Raya No. 117 Rt. 10/04, Cikini Kec. Menteng  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330  
[www.pttun-jakarta@gmail.com](mailto:www.pttun-jakarta@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

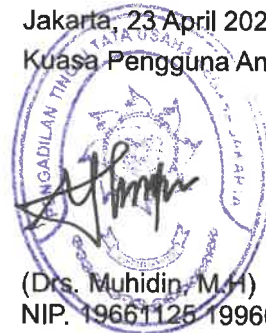
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bagian Anggaran 005.05 Audited TA 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Keuangan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 23 April 2026  
Kuasa Pengguna Anggaran



(Drs. Muhidin, M.H)  
NIP. 19661125 199603 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	3
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN .....	4
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) .....	5
II. NERACA.....	5
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	6
V. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA.....	13
VI. DATA CAPAIAN OUTPUT PER FUNGSI DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025.....	15
VII. LAMPIRAN DAN DAFTAR.....	19
1. Laporan Realisasi Anggaran Face (berstatus final dari MonSAKTI)	
2. LRA Pendapatan per akun (berstatus final dari MonSAKTI)	
3. LRA Belanja per akun (berstatus final dari MonSAKTI)	
4. Laporan Neraca (berstatus final dari MonSAKTI)	
5. Laporan Neraca Percobaan Kas (berstatus final dari MonSAKTI)	
6. Laporan Neraca Percobaan Akrua (berstatus final dari MonSAKTI)	
7. Laporan Operasional (berstatus final dari MonSAKTI)	
8. Laporan Perubahan Ekuitas (berstatus final dari MonSAKTI)	
9. Dokumen lain yang diperlukan.	



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



### PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya No 117, RT 10 RW 4, Cikini, kecamatan Menteng  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.  
www.pttun.jakarta@gmail.com

#### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 23 April 2026  
Kepala UAPPA-W DKI Jakarta,  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
  
Drs. Muhidin, M.H  
NIP.19661125 199603 1 001



Laporan Keuangan Kantor Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Audited Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 14,799,500 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 13,423,00; Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 51,911,160; atau mencapai 99.94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 51,940,000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0. Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp.0; Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp. 0; Uang muka dari KPPN sebesar Rp. 0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 0.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 14,799,500; sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 75,290,160; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (60,490,660) Surplus dari Kegiatan



Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. (60,490,660) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (60,490,660)

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0; ditambah Defisit-LO sebesar Rp. (60,490,660) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0; dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp. 60,490,660; sehingga kenaikan/penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 0; dan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 0;

#### **5. LAPORAN NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)**

Laporan Percobaan (Basis Akrua) menyajikan berbagai informasi pendapatan dan pengeluaran yang terdiri dari Entitas Lain, Transfer Masuk, Pendapatan Uang Meja (leges), Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Peradilan Lainnya dan Beban-Beban Lainnya.

Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 nilai Neraca Percobaan (Basis Akrua) ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp. 51.911.160; Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp. 14.799.500; Transfer Masuk sebesar Rp. 23.379.000; Pendapatan Uang Meja (leges) sebesar Rp. 280.000; Pendapatan Ongkos Perkara sebesar Rp. 4.490.000; Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya sebesar Rp. 10.029.500; dan Beban-Beban didalam Neraca Percobaan yaitu Beban Bahan sebesar Rp. 14.411.160; Beban Jasa Konsultan sebesar Rp. 14.400.000; Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 23.100.000; Beban Persediaan Konsumsi sebesar Rp. 23.379.000;

#### **6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.



Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Neraca Percobaan untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual

## **7. CATATAN LAPORAN KEUANGAN PERKARA**

Dalam penyajian Laporan Keuangan Perkara untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan Laporan dari Bendahara Kepaniteraan dengan uraian yang disajikan antara lain Sisa Saldo Awal sebesar Rp. 48.835.980; Penerimaan untuk bulan Desember sebesar Rp. 100.477.000; dikurangi dengan Biaya-biaya antara lain Biaya Panggilan Sebesar Rp. 1.698.660; Biaya Pemberitahuan sebesar Rp. 275.880; Biaya Pengiriman Berkas sebesar Rp. 9.036.500; Biaya Materai sebesar Rp. 520.000; Biaya Hak-hak Kepaniteraan sebesar Rp. 12.331.500; Biaya Lain-lain (ATK) sebesar Rp. 11.450.000; Pengiriman Biaya Perkara sebesar Rp. 7.165.500; dan Pengembalian Sisa Panjar sebesar Rp. 22.152.940;.



**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)****Untuk Periode Audited Tahun 2025 Dan Tahun 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2025		% thd Angg.	TA. 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1	13,423,000	14,799,500	110.25%	13,709,50
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		13,423,000	14,799,500	110.25%	13,709,50
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	A.2				
Belanja Barang	A.3	51,940,000	51,911,160	99.94%	99,004,897
Belanja Modal	A.4				
Belanja Bantuan Sosial	A.5				
<b>JUMLAH BELANJA</b>		51,940,000	51,911,160	99.94%	99,004,897

Jakarta, 23 April 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



(Drs. Muhidin, M.H)

NIP. 19661125 199603 1 001



## II. NERACA

### Untuk Periode Audited Tahun 2025 Dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
<b>ASET</b>	B.1		
<b>ASET LANCAR</b>	B.2		
B.2.1		0	0
B.2.2		0	0
B.2.3		0	0
<b>ASET TETAP</b>	B.3		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	B.4	0	0
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	B.5		
B.5.1			
Jumlah Piutang Jangka Panjang	B.6		
<b>ASET LAINNYA</b>	B.7		
B.7.1			
B.7.2			
B.7.3			
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	B.8	0	0
<b>JUMLAH ASET</b>	B.9		
<b>KEWAJIBAN</b>	B.10		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	B.11		
B.12.1	B.12	0	0
B.12.2		0	0
B.12.3			
B.12.3		0	
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	B.13	0	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	B.14	0	0
<b>EKUITAS</b>	B.15	0	0
B.15.1			
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	B.16	0	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	B.17	0	0

Jakarta, 23 April 2026  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
 (Drs. Muhidin, M.H)  
 NIP. 19661125 199603 1 001



### III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

#### Untuk Periode Audited Tahun 2025 Dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	C.1	14,799,500	13,709,500
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		14,799,500	13,709,500
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	C.2		
Beban Persediaan	C.3	23,379,000	38,688,06
Beban Barang dan Jasa	C.4	28,811,160	36,497,900
Beban Pemeliharaan	C.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	C.6	23,100,000	59,507,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	C.7		
Beban Penyisihan Piutang Tak Teragih	C.8		
<b>JUMLAH BEBAN</b>	C.9	75,290,160	134,692,966
<b>SURPLUS (DEPISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	C.10	(60,490,660)	(120,983,466)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Depositi Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	C.11		
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	C.12		
Surplus/Depositi dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	C.13		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	C.14		
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	C.15		
<b>SURPLUS/DEPISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	C.16		
<b>SURPLUS/DEPISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	C.17	(60,490,660)	(120,983,466)
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pos Luar Biasa	C.18		
Beban Luar Biasa	C.19		
<b>SURPLUS/DEPISIT LO</b>		(60,490,660)	(120,983,466)

Jakarta, 23 April 2026  
 Kuasa Pengguna Anggaran



(Drs. Muhidin, M.H)  
 NIP. 19661125 199603 1 001



#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

##### Untuk Periode Audited Tahun 2025 Dan Tahun 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	D.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT -LO	D.2	(60,490,660)	(120,983,466)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	D.3	60,490,660	120,983,466
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		0	0
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>D.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jakarta, 23 April 2026  
 Kuasa Pengguna Anggaran



(Drs. Muhidin, M.H)  
 NIP. 19661125 199603 1 001



## V. LAPORAN PERCOBAAN (BASIS KAS & AKRUAL)

### Untuk Periode Audited Tahun 2025

URAIAN	CATATAN	DEBET	KREDIT
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.1	0	51,911,160
Diterima dari Entitas Lain	E.2	14,799,500	0
Transfer Masuk	E.3	0	23,379,000
Pendapatan Uang Meja (Leges)	E.4	0	280,000
Pendapatan Ongkos Perkara	E.5	0	4,490,000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	E.6		10,029,500
Beban Bahan	E.7	14,411,160	
Beban Jasa Konsultan	E.8	14,400,000	
Beban Perjalanan Dinas	E.9	23,100,000	
Beban Persediaan Konsumsi	E.10	23,379,000	
<b>JUMLAH</b>		<b>90,089,660</b>	<b>90,089,660</b>

Jakarta, 23 April 2026  
 Kuasa Pengguna Anggaran



(Drs. Muhidin, M.H)  
 NIP. 19661125 199603 1 001



## VI. LAPORAN KEUANGAN PERKARA

### Untuk Periode Audited Tahun 2025

URAIAN	CATATAN	DEBET	KREDIT
Sisa Awal	F.1	48.835.980	0
Penerimaan Bulan Desember	F.2	100.477.000	0
Biaya Panggilan	F.3	0	1.698.660
Biaya Pemberitahuan	F.4	0	275.880
Biaya Pengiriman Berkas	F.5	0	9.036.500
Biaya Materai	F.6		520.000
Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	F.7		12.331.500
Biaya ATK	F.8		11.450.000
Pengiriman Biaya Perkara	F.9		7.165.500
Pengembalian Sisa Panjar	F.10		22.152.940
	F.11	149.312.980	64.630.980
Saldo	F.12		84.682.000
<b>JUMLAH</b>		<b>149.312.980</b>	<b>149.312.980</b>

Jakarta, 23 April 2026  
Kuasa Pengguna Anggaran



(Drs. Muhidin, M.H)  
NIP. 19661125 199603 1 001



## VII. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

### 1.A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU

#### 1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025

##### a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Uralan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
A. Pagu		51,940,000		51,940,000
B. Reallsasi s.d. 31 Desember 2025		51,911,160		51,911,160
C. % Realisasi s.d. 31 Desember 2025 (B / A)		99.94%		99.94%
D. Pagu Blokir				
E. % Realisasi Setelah Memperhitungkan Pagu Blokir(B / (A - D))		0%		0%
F. Trajectory IKPA		%		%
G. Sisa Pagu s.d. 31 Desember 2025 Termasuk Blokir (A - B)		28,840		28,840
H. Rencana Realisasi				
I. Estimasi Total Realisasi(B + H)		51,911,160		51,911,160
J. % Estimasi Total Realisasi(I / A)		%		%
K. Estimasi Pagu Tidak Terealisasi (A - I)		28,840		28,840
L. Estimasi Pagu Tidak Terealisasi di Luar Blokir(A - D - I)				

Sampai dengan Audited Tahun 2025, Realisasi Belanja Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp. 51,911,160; atau (99.94%). Apabila pagu blokir dikecualikan, Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebesar Rp. 0; atau (0%).

##### b. Informasi Pagu Blokir

(dalam rupiah)

Akun	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu
A	B	C	D
51	Belanja Pegawai		
52	Belanja Barang		
53	Belanja Modal		
	<b>Total</b>		



Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat sisa pagu yang masih diblokir sebesar Rp. 0;

## 2. Informasi *Outstanding* Kontrak Signifikan

### a. Informasi *Outstanding* Kontrak

(dalam rupiah)

No.	Kanwil/Satker	Jumlah Kontrak	Nilai Total Kontrak	Realisasi	Sisa Nilai Kontrak
1	PTTUN Jakarta	0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>

Sumber: Aplikasi OMSPAN

Sampai dengan Audited tahun 2025, terdapat 0; kontrak yang masih *outstanding* dengan nilai kontrak sebesar Rp.0; dan realisasi sebesar Rp.0;

### b. Informasi *Outstanding* Kontrak Signifikan

Informasi *outstanding* kontrak signifikan dengan nilai di atas Rp 1 miliar, antara lain:

(dalam rupiah)

No.	Kode Satker	No. Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
1	526705	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Aplikasi OMSPAN

Berdasarkan *outstanding* kontrak signifikan tersebut, sebanyak 0 kontrak diperkirakan dapat diselesaikan tepat waktu dan sebanyak 0 kontrak tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

## 3. Informasi Progres Likuidasi Entitas Akuntansi TA 2025

### a. Progres Likuidasi Berdasarkan Mutasi Nilai Aset Dan Kewajiban

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

(dalam rupiah)

Pos Neraca	Nilai Saldo Audited 2025	Nilai Saldo Audited 2024	Mutasi	% Progres Likuidasi
A	B	C	D (B - C)	E (D / B x 100%)
<b>Aset</b>				
- Aset Lancar	0	0	0	0
- Aset Tetap	0	0	0	0
- Properti Investasi	0	0	0	0
- Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
- Aset Lainnya	0	0	0	0
<b>Kewajiban</b>	0	0	0	0
- Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0
- Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0



## 1.B. INFORMASI PENTING LAINNYA

### 1. RINCIAN OUTPUT (RO) TAHUN 2025

Terdapat Rincian Output (RO) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta II, dengan rincian realisasi anggaran dan capaian output sampai dengan Audited TA 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Kode Rincian Output Strategis	Uraian Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan (Rp)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Rincian Output
A	B	C	D	E	$F (E / C \times 100\%)$	G	H	$I (H / G \times 100\%)$
1	1059.AEA	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan TUN	21.200.000	21.200.000	100%	3	3	100%
2	1059.AEA	Dukungan Penyelesaian Perkara	12.240.000	12.240.000	100%	1	1	100%
3	1059.AEA	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan TUN	1.900.000	1.900.000	100%	1	1	100%
5	1059.QBA	Layanan Posbakum di lingkungan Peradilan TUN	16.600.000	16.571.160	100%	48	48	100%

### 2. Kondisi Keuangan Yang Memerlukan Perhatian Khusus

#### a. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Realisasi Anggaran

##### 1) Pendapatan Negara dan Hibah

Uraian Akun	Realisasi s.d. Audited Tahun 2025	Realisasi s.d. Audited Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	$D (B - C)$	$E (D / C \times 100\%)$
Pendapatan Negara dan Hibah	14,799,500	13,709,500	1.090.000	

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA. 2025 mengalami Kenaikan dibandingkan realisasi TA .2024.

##### 2) Belanja Negara

Uraian Akun	Realisasi s.d. Audited Tahun 2025	Realisasi s.d. Audited Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	$D (B - C)$	$E (D / C \times 100\%)$
Belanja Negara	51,911,160	99,004,897	(47.093.737)	(0.17)

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 51,911,160; atau 99.94% dari anggaran belanja sebesar Rp. 51.940.000; mengalami kenaikan dibandingkan realisasi Belanja pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 99.004.897; atau 99.77%



## b. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Operasional

### 1) Pendapatan

Uraian Akun	Realisasi s.d. Audited Tahun 2025	Realisasi s.d. Audited Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B - C)	E (D / C x 100%)
Pendapatan Negara Bukan pajak	14,799,500	13,709,500	1.090.000	

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 363,253,550; dan Rp. 117,738,000; mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2.085%

### 2) Beban

Uraian Akun	Realisasi s.d. Audited Tahun 2025	Realisasi s.d. Audited Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B - C)	E (D / C x 100%)
Beban Pegawai				
Beban Persediaan	23,379,000	38,688,066	(15,309,066)	(39.571)
Beban Barang dan Jasa	28,811,160	36,497,900	(7,686,740)	(21.061)
Beban Pemeliharaan				
Beban Perjalanan Dinas	23,100,000	59,507,000	(36,407,000)	(61.181)
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih				
Jumlah	75,290,160	134,692,966	(59,402,806)	(44.102)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## c. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian Akun	Realisasi s.d. Audited Tahun 2025	Realisasi s.d. Audited Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B - C)	E (D / C x 100%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEPISIT-LO	(60,490,660)	(120,983,466)	60,492,806	(50)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	60,490,660	120,983,466	(60,492,806)	(50)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0



Ekuitas merupakan selisih antara asset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### d. Penjelasan Akun-Akun Signifikan pada Neraca

##### 1) Aset

Uraian Akun	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B - C)	E (D / C x 100%)
ASET LANCAR	0	0	0	0
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
Kas Lainnya setara Kas	0	0	0	0
Persediaan	0	0	0	0
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	0	0	0	0
<b>JUMLAH ASET</b>	0	0	0	0

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### 2) Kewajiban

Uraian Akun	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B - C)	E (D / C x 100%)
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	0	0	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0
Utang Yang Belum di Tagihkan	0	0	0	0
Uang Muka Dari KPPN	0	0	0	0
<b>Jumlah Ekuitas</b>	0	0	0	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	0	0	0	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	0	0	0	0

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



## b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## 3) Ekuitas

Uraian Akun	Realisasi s.d. Audited Tahun 2025	Realisasi s.d. Audited Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	% Kenaikan (Penurunan)
A	B	C	D (B - C)	E (D / C x 100%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEPOSIT-LO	(60,490,660)	(120,983,466)	60,492,806	(50)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	60,490,660	120,983,466	(60,492,806)	(50)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.



**VI. LAMPIRAN DAN DATA DUKUNG**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005  
 ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Milliter dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05  
 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA 526705

Tgl Data : 23/04/26 7:32 AM  
 Tgl Cetak : 23/04/26 1:41 PM  
 Halaman : 1  
 lrp\_tm\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	13,423,000	14,799,500	1,376,500	110,25	0	13,709,500	13,709,500	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dan Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	13,423,000	14,799,500	1,376,500	110,25	0	13,709,500	13,709,500	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	13,423,000	14,799,500	1,376,500	110,25	0	13,709,500	13,709,500	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	51,940,000	51,911,160	(28,840)	99,94	99,230,000	99,004,897	(225,103)	99,77
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	51,940,000	51,911,160	(28,840)	99,94	99,230,000	99,004,897	(225,103)	99,77
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**

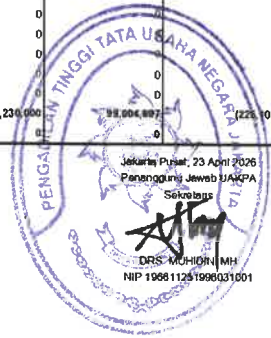


KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005  
 ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Milliter dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05  
 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA 526705

Tgl Data : 23/04/26 7:32 AM  
 Tgl Cetak : 23/04/26 1:41 PM  
 Halaman : 2  
 lrp\_tm\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dena Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dena Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dena Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dena Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dena Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dena Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dena Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dena Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	51,940,000	51,911,160	(28,840)	99,94	99,230,000	99,004,897	(225,103)	99,77
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:  
 BELUM FINAL  
 \*)MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : ( 006 ) MAHKAMAH AGUNG  
ESELON I : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : ( 626706 ) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Tgl Data : 23/04/26 7:32 AM  
Tgl Cetak : 23/04/26 1:42 PM  
Halaman : 1  
lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	14,799,500	13,709,500	1,090,000	7.951
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	14,799,500	13,709,500	1,090,000	7.951
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	14,799,500	13,709,500	1,090,000	7.951
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	23,379,000	38,688,066	(15,309,066)	(39.571)
Beban Barang dan Jasa	28,811,160	36,497,900	(7,686,740)	(21.061)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	23,100,000	59,507,000	(36,407,000)	(61.181)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	



**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
 SATUAN KERJA : ( 526705 ) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Tgl Data : 23/04/26 7:32 AM  
 Tgl Cetak : 23/04/26 1:42 PM  
 Halaman : 2  
 lap\_lo\_salker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0	0
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>75,290,160</b>	<b>134,692,966</b>	<b>(59,402,806)</b>	<b>(44.102)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(60,490,660)</b>	<b>(120,983,466)</b>	<b>60,492,806</b>	<b>(50.001)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(60,490,660)</b>	<b>(120,983,466)</b>	<b>60,492,806</b>	<b>(50.001)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(60,490,660)</b>	<b>(120,983,466)</b>	<b>60,492,806</b>	<b>(50.001)</b>

Keterangan :  
 BELUM FINAL  
 \*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 TINGKAT SATUAN KERJA  
 PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
 SATUAN KERJA : ( 626705 ) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA  
 Tgl Data : 23/04/26 6:36 AM  
 Tgl Cetak : 23/04/26 1:42 PM  
 Halaman : 1  
 lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(60,490,660)	(120,983,466)	60,492,806	(50)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	60,490,660	120,983,466	(60,492,806)	(50)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :  
 BELUM FINAL  
 \*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta Pusat, 23 April 2026  
 Penanggung Jawab UAKPA  
 Sekretaris  
  
 DRS. MUHDIN, MH  
 NIP. 190614251998031001



**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :** ( 006 ) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORGANISASI :** ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
**WILAYAH/PROVINSI :** ( 0100 ) DKI JAKARTA  
**SATUAN KERJA :** ( 526705 ) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Tgl Data : 23/04/26 7:32 AM  
 Tgl Cetak : 23/04/26 1:42 PM  
 Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---

Keterangan :  
 BELUM FINAL  
 \*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



**NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :** ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORGANISASI :** ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
**WILAYAH/PROVINSI :** ( 0100 ) DKI JAKARTA  
**SATUAN KERJA :** ( 526705 ) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
 Tgl Data : 23/04/26 7:32 AM  
 Tgl Cetak : 23/04/26 1:43 PM  
 Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	51,911,160
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	14,799,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	23,379,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	280,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	4,490,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	10,029,500
3.0	521211	Beban Bahan	14,411,160	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	14,400,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	23,100,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	23,379,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>99,089,660</b>	<b>99,089,660</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)  
 TINGKAT SATUAN KERJA  
 PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Dijen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 526705 ) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Tgl Data : 23/04/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 23/04/26 1:43 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	51,911,160
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	14,799,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	280,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	4,490,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	10,029,500
3.0	521211	Belanja Bahan	14,411,160	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	14,400,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,100,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>66,710,660</b>	<b>66,710,660</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
 REKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN  
 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

LAPORAN TAHUNAN KEUANGAN PERKARA  
 TINGKAT PERTAMA  
 TAHUN 2025

BULAN : DESEMBER TAHUN : 2025

NOMOR	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	SISA AWAL	Rp 48.835.980	-
2	PENERIMAAN BULAN INI	Rp 100.477.000	-
3	BIAYA PANGGILAN		Rp 1.698.660
4	BIAYA PEMBERITAHUAN		Rp 275.880
5	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT		
6	BIAYA PENERJEMAH/SUMPAH/SAKSI		
7	BIAYA PENGIRIMAN BERKAS		Rp 9.036.500
8	BIAYA MATERAI		Rp 520.000
9	BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN		Rp 12.331.500
10	BIAYA MEDIA MASSA		
11	BIAYA LAIN-LAIN (ATK)		Rp 11.450.000
12	PENGIRIMAN BIAYA PERKARA		Rp 7.165.500
13	PENGEMBALIAN SISA PANJAR		Rp 22.152.940
		Rp 149.312.980	Rp 64.630.980
	SALDO :		Rp 84.682.000
	J U M L A H :	Rp 149.312.980	Rp 149.312.980

Jakarta, 31 Desember 2025

Mengetahui,  
 KETUA

H. ISWAN HERWIN, SH., MH  
 NIP. 19590215 198612 1 001

Pih. PANITERA

DARUL NAPIS, SH  
 NIP. 197201251993031003

